

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
UMKM DALAM MEWUJUDKAN DESA
MANDIRI DI DESA TANJUNG PURBA
KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

IRFAN SHENDY SANUTRA GULTOM

228520028



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/26

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
UMKM DALAM MEWUJUDKAN DESA
MANDIRI DI DESA TANJUNG PURBA
KECAMATAN BANGUN PURBA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

OLEH:

IRFAN SHENDY SANUTRA GULTOM

228520028

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)15/7/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Nama : Irfan Shendy Sanutra Gultom

Npm : 228520028

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:



Agung Suharyanto, S.Sn., M. Si

Pembimbing

Mengetahui:



Krief Lubis, S.Sos., M.IP
Dekan



Andra Muda M.AP
Kaprosdi Administrasi Publik

Tanggal lulus: 08 April 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Maret 2026



Irfan Shendy Sanutra Gultom

228520028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Shendy Sanutra Gultom

NPM : 228520028

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : : "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Umkm Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan,

16 Maret 2026



Irfan Shendy Sanutra Gultom

ABSTRAK

Pembangunan desa mandiri menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi utama dalam penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya di Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan adanya dukungan pemerintah desa, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi permodalan dan pemasaran. Namun demikian, pelaksanaan program belum optimal karena masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, serta belum maksimalnya koordinasi antar kelembagaan desa. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas aparatur, konsistensi pendampingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung terwujudnya desa mandiri secara berkelanjutan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, UMKM desa, desa mandiri, ekonomi lokal

ABSTRACT

Independent village development places community empowerment as a primary strategy in strengthening the local economy through the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of the community empowerment program through MSME development and identify factors inhibiting its implementation in Tanjung Purba Village, Bangun Purba District, Deli Serdang Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type, through data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted descriptively with reference to the George C. Edwards III policy implementation model which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the community empowerment program through MSME development has been quite effective, marked by the support of the village government, the implementation of entrepreneurship training, and the facilitation of capital and marketing. However, the program implementation has not been optimal due to still existing obstacles, such as limited human resources, low digital literacy of MSME actors, and less than optimal coordination between village institutions. Thus, the success of the program implementation is greatly influenced by increasing the capacity of the apparatus, consistent mentoring, and active community participation in supporting the realization of independent villages in a sustainable manner.

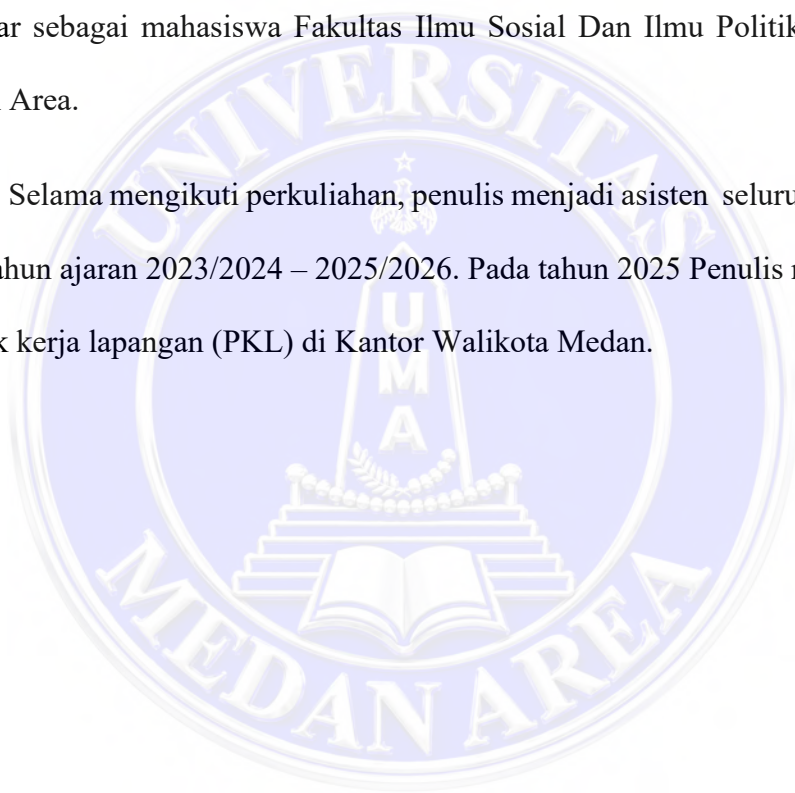
Keywords: *policy implementation, community empowerment, village MSMEs, independent villages, local economy*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Duri Pada tanggal 19 September 2003 dari ayah Midian Gultom dan ibu Rita Hotmaida Hutagalung. Penulis merupakan putra Pertama dari Empat bersaudara.

Tahun 2021 Penulis lulus dari SMA N 1 MANDAU dan pada tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten seluruh mata kuliah pada tahun ajaran 2023/2024 – 2025/2026. Pada tahun 2025 Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Walikota Medan.

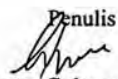


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Riset Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Desa dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Agung Suharyanto, S. Sn, M. Si selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Tebe Holo Purba S.P selaku Kepala Desa Tanjung Purba Dan Ibu Nurul Azizah S.E Selaku Sekretaris Desa Tanjung Purba yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah dan Ibu saya serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Irfan Shendy Sanutra Gultom

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal ini dengan judul ***“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.”***

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, yaitu Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Drs., Indra Muda, M.AP, selaku Ketua Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis melalui setiap tahap penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas segala motivasi, arahan, masukan, dan saran berharga yang Bapak berikan, yang menjadi fondasi penting dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Ibu khairunnisah Lubis, S.Sos., M.I.Pol Selaku Ketua panitia yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak beltahmamero Simamora, S.IP., MPA Selaku Sekretaris panitia yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Nina Angelia, SSos., M.Si selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk *support system* dan panutan. Bapak Midian Gultom, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih

untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.

9. Untuk Mama tersayang. Mama Rita Hotmaida Hutagalung yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
10. Kepada adik-adikku tercinta. Silvia Anjelina Gultom, Estomihi Arta Arga Gultom, dan Frans Dominus Gultom. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan sangat berarti dalam perjalanan ini.
11. Kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i prodi Administrasi Publik angkatan 2022, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa,

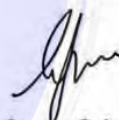
setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kalian berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kita.

12. Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kemudahan administrasi dalam proses perkuliahan.
13. Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kantor Desa Tanjung Purba, serta masyarakat Desa Tanjung Purba, terimakasih sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
14. Kepada teman seperjuangan kelas Administrasi Publik A2 Angkatan 2022 Yang telah memberikan semangat dan dukungan di setiap perjalanan perkuliahan sampai saat ini
15. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok anak Laki-laki pertama yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana yang memiliki impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Irfan Shendy Sanutra Gultom. Anak laki-laki pertama dari 4 bersaudara dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau

ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Penulis menyampaikan bahwasannya penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis



Irfan Shendy Sanutra Gultom

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.4.3. Manfaat Akademis	9
 II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Konsep Implementasi Program/Kebijakan	10
2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	12
2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	19
2.3 Konsep Desa Mandiri	23
2.3.1 Definisi Desa Mandiri	23
2.3.2 Indikator Desa Mandiri	27
2.4 Konsep UMKM dan Ekonomi Desa	34

2.4.1 Definisi Dan Kriteria UMKM di Indonesia	34
2.4.2 Peran Strategis UMKM Dalam Perekonomian Desa Dan Penyerapan Tenaga Kerja.....	37
2.5 Penelitian Terdahulu.....	38
2.6 Kerangka Pemikiran	41
III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	45
3.2.2 Waktu Penelitian.....	45
3.3 Informan/Narasumber.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	51
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Purba	56
4.1.2 Keadaan Geografis Desa Tanjung Purba	58
4.1.3 Kondisi Demografi Desa Tanjung Purba.....	59
4.1.4 Visi Misi Kepala Desa Tanjung Purba	60
4.1.5 Struktur Pemerintah Desa Dan Kelembagaan Desa	61
4.1.6 Kondisi UMKM Desa Tanjung Purba	62
4.2 Pembahasan	64
4.2.1 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.....	64
4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang	98
V SIMPULAN DAN SARAN	103
5.1 Simpulan.....	103
5.2 Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	38
2. Waktu Penelitian	45
3. Informan Penelitian	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berpikir	43
2. Desa Tanjung Purba	57
3. Peta Geografis Desa Tanjung Purba	58
4. Struktur Organisasi Desa Tanjung Purba	61
5. Data Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba	74



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	112
2. Pedoman Observasi	117
3. Biodata Informan	119
4. Dokumentasi dilapangan	121
5. Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian.....	126



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia, desa diposisikan sebagai pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Konsep Desa Mandiri merupakan wujud nyata dari pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pada kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan dan partisipatif. Kemandirian desa tidak hanya diartikan sebagai kemampuan ekonomi, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Desa yang mandiri mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional karena keberadaannya menjadi simpul penting dalam sistem otonomi daerah. Landasan yuridisnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya strategis untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian warga desa melalui peningkatan kapasitas, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya lokal.

Pemberdayaan menjadi instrumen yang menggeser paradigma pembangunan dari *top-down* ke *bottom-up* sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan. Esensi pembangunan desa mandiri bertumpu pada prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah.

Program pemberdayaan masyarakat menjadi medium implementatif dari amanat UU Desa dan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Arah kebijakan pemberdayaan difokuskan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, berinovasi, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial ekonomi. UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan pada tingkat lokal tidak hanya berbentuk pelatihan atau bantuan ekonomi, tetapi melibatkan proses peningkatan literasi, kesadaran sosial, dan pengorganisasian masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan masyarakat desa yang mandiri, produktif, dan adaptif terhadap transformasi ekonomi digital. Pemahaman ini sejalan dengan temuan (Wahib et al., 2024:107) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam membangun desa mandiri.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang difasilitasi melalui sejumlah kebijakan daerah yang memberikan dasar hukum bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan ekonomi lokal. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2020 mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, serta fungsi Dinas Koperasi dan UMKM sebagai lembaga pelaksana pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten. Peraturan ini menegaskan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan iklim

usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM melalui pelatihan, fasilitasi permodalan, dan pendampingan usaha. kemudian memperkuat fungsi kelembagaan tersebut dengan memperjelas struktur organisasi dan pembagian tugas antarbidang dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di Deli Serdang. Kebijakan daerah tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung pembangunan desa melalui pendekatan ekonomi rakyat yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam konteks UMKM menghadapi tantangan yang kompleks, terutama pada aspek digitalisasi dan pemasaran produk. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di wilayah pedesaan belum mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal karena keterbatasan literasi dan infrastruktur. Studi oleh (Fitriana et al., 2025:56) menemukan bahwa pelatihan digitalisasi bagi UMKM memang mampu meningkatkan pengetahuan peserta hingga 85% dan omzet sebesar 30%, tetapi dampaknya masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki akses informasi dan teknologi memadai. Hasil serupa ditunjukkan dalam penelitian kebijakan pengembangan UMKM digital yang menemukan adanya kesenjangan signifikan antara formulasi kebijakan dan realitas implementasi di lapangan (Hapiz et al., 2025:42). Fakta ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh efektivitas proses implementasinya.

Pembangunan desa mandiri di Kabupaten Deli Serdang menurut Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Deli Serdang 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang menunjukkan variasi perkembangan dengan capaian indeks yang beragam di antara desa-desa. Data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mengindikasikan bahwa suatu desa dapat diklasifikasikan sebagai mandiri apabila nilai IDM-nya melebihi 0,8155. Meskipun beberapa desa telah mencapai kategori mandiri dengan skor IDM yang tinggi, seperti rentang 0,8914 hingga 0,9333, sebagian besar desa lainnya masih tergolong dalam kategori berkembang dan tertinggal. Disparitas capaian ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan desa, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Fenomena ini menegaskan bahwa pencapaian status desa mandiri tidak semata-mata dapat dievaluasi melalui indikator administratif, melainkan harus didukung oleh program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan kontekstual. Oleh karenanya, penekanan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi krusial untuk mewujudkan desa mandiri, terutama di Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, yang merupakan bagian dari Kabupaten Deli Serdang.

Desa Tanjung Purba, yang terletak di Kecamatan Bangun Purba, memiliki potensi sumber daya lokal yang cukup besar, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit dan tanaman pangan lainnya yang sudah menjadi

sumber penghasilan masyarakat di wilayah tersebut. Kecamatan Bangun Purba mencakup 24 desa dengan tingkat perkembangan yang bervariasi menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Bah Balua dan Desa Bah Perak termasuk dalam kategori desa berkembang. Sebaliknya, Desa Sialang dan Desa Bangun Purba telah mencapai status desa mandiri, yang mencerminkan kemandirian relatif lebih tinggi pada dimensi sosial, ekonomi, serta pelayanan dasar. Desa Tanjung Purba memperoleh status IDM maju, yang mengindikasikan potensi ekonomi lokal signifikan, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, terdapat kesenjangan yang nyata antara potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan (*Bapenda Kab. Deli Serdang, 2024*).

Mayoritas pelaku UMKM di desa tersebut masih mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan pemasaran digital guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing. Fenomena ini bertentangan dengan dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat pada masa kini. Pemilihan Desa Tanjung Purba sebagai lokus penelitian didasarkan pada potensi ekonomi yang sedang berkembang, disertai tantangan optimalisasi digitalisasi UMKM. Kesenjangan penelitian muncul dari minimnya integrasi strategi pemasaran digital dalam pemberdayaan UMKM di desa berstatus IDM maju, meskipun struktur desa tersebut menyediakan peluang akselerasi pertumbuhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis peran serta strategi pemberdayaan UMKM berbasis

pemasaran digital dalam konteks desa maju, khususnya di Desa Tanjung Purba. Penelitian diharapkan menyumbang kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi desa yang berorientasi teknologi digital. Berdasarkan obesrvasi saya dilapangan adapun program UMKM yang sudah dilaksanakan di desa tanjung purba yaitu pembuatan kerajinan rumah tangga, usaha kuliner tradisional, toko sembako harian, menjahit, pembibitan tanaman pangan, ternak ikan dan lain-lain.

Program pemberdayaan melalui UMKM di desa ini bertujuan meningkatkan kapasitas wirausaha masyarakat, memperluas akses pasar, serta memperkenalkan sistem digitalisasi dalam pengelolaan usaha. Kondisi awal menunjukkan bahwa masyarakat masih mengandalkan sistem pemasaran tradisional dan memiliki literasi teknologi rendah, sehingga partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan relatif terbatas. Potensi dan hambatan tersebut menjadikan Desa Tanjung Purba sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji implementasi kebijakan pemberdayaan melalui pengembangan UMKM dalam kerangka pembangunan desa mandiri.

Studi Purwanta et al., (2025: 149) menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pemasaran di desa memerlukan pendekatan terintegrasi melalui penyusunan basis data, sistem *geotagging*, dan pendampingan berkelanjutan agar dapat berfungsi secara efektif. Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan sangat ditentukan oleh konsistensi pendampingan dan kesiapan infrastruktur digital di tingkat lokal.

Proses pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sesungguhnya merupakan interaksi kompleks antara aktor pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan lokal. Efektivitas program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana proses implementasi mampu mengakomodasi kebutuhan, nilai, dan konteks sosial masyarakat. Proses ini mencakup bagaimana masyarakat dilibatkan, sejauh mana kapasitas mereka diperkuat, dan bagaimana kelembagaan lokal menjembatani akses terhadap teknologi, pasar, dan sumber daya. Penelitian terdahulu (Ningsih, 2023), Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Camat Medan Kota cenderung berfokus pada hasil akhir seperti peningkatan pendapatan atau jumlah pelaku UMKM baru, sementara kajian yang menelaah secara mendalam aspek proses implementasi masih terbatas. Analisis terhadap proses memungkinkan pemahaman lebih dalam mengenai hambatan struktural, pola interaksi sosial, dan efektivitas kebijakan yang diterapkan di tingkat terendah.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana kebijakan pemberdayaan diterjemahkan ke dalam praktik nyata di lapangan. Studi tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba berpotensi mengungkap dinamika antara kebijakan pemerintah dan tindakan masyarakat desa dalam mengelola perubahan sosial ekonomi. Pendekatan yang menekankan proses implementasi memberikan peluang untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan program, seperti kepemimpinan lokal, partisipasi warga, kapasitas

aparatur, serta dukungan infrastruktur digital. Analisis proses implementasi juga dapat menjelaskan alasan mengapa kesenjangan masih terjadi meskipun dukungan kebijakan sudah kuat, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada kondisi empiris masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.
2. Mendeskripsikan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana proses administrasi pemerintahan, mekanisme implementasi program, serta peran aparatur publik berpengaruh terhadap efektivitas

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi strategis bagi pemerintah desa serta lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif bagi pengambil kebijakan di tingkat lokal dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih tepat dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya desa yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing.

1.4.3. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memperkaya ilmu administrasi publik, khususnya terkait Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan pendekatan kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Program/Kebijakan

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan secara komprehensif membutuhkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Pemahaman yang lebih baik akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan diterapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Dalam implementasi dikaitkan dengan suatu Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan van Horn dalam (Jumroh, 2021:131) meyakini bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Menurut Grindle (1980) di dalam (Subianto, 2020:46) menyatakan bahwa implementasi kebijakan mencakup banyak hal, bukan hanya bagaimana Keputusan politik dimasukkan ke dalam rutinitas birokrasi. Dan juga mencakup masalah konflik kepentingan, Keputusan, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan.

Menurut Luankali (2007) dalam (Amiruddin, 2018:19) menyatakan bahwa salah satu fokus perhatian implementasi kebijakan adalah pemahaman tentang apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dibuat.

Menurut George C. Edwards III dikutip dari (Dianti, 2024:5) Dalam proses implementasi kebijakan bukan hal yang mudah untuk mencapai tujuan Bersama, sulit untuk menerapkannya dengan cara yang memuaskan semua orang. Kesulitan yang untuk memenuhi keinginan berbagai kelompok, dapat menyebabkan peselisihan yang mendorong pemikiran politik sebagai konflik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan implemetasi kebijakan secara mendasar adalah pelaksanaan atau penerapan tindakan yang terarah untuk merealisasikan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Para ahli melihatnya sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor, baik pemerintah maupun swasta, yang bertujuan tunggal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (Van Meter dan van Horn). Namun, cakupannya luas; Grindle menekankan bahwa implementasi tidak hanya sebatas memasukkan keputusan politik ke dalam rutinitas birokrasi, melainkan juga mencakup pengelolaan konflik kepentingan, proses pengambilan keputusan, dan menentukan alokasi keuntungan dari kebijakan tersebut. Fokus perhatian implementasi, menurut Luankali, adalah pada pemahaman tentang apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program resmi diberlakukan. Meskipun demikian, George C. Edwards III menyoroti bahwa proses ini sangat menantang karena sulitnya memuaskan semua pihak, yang sering

kali memicu konflik dan mempertegas bahwa implementasi adalah dimensi politik yang kompleks.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980) dalam Subianto (2020:70) , menguraikan berbagai pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik dari sejumlah ahli. Pendekatan tersebut mencakup studi kasus oleh Merilee S. Grindle, analisis keputusan berdasarkan karya Graham Allison dalam "*Essence of Decision*" (1971) sebagaimana dikutip oleh Grindle, analisis keputusan oleh Allison dalam buku Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn, serta pendekatan terakhir oleh Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian.

Edwards III dalam Subianto (2020:71) membangun teorinya dengan merujuk pada dua pertanyaan mendasar dalam studi implementasi kebijakan, yakni: Pertama, Apakah prasyarat yang diperlukan untuk implementasi kebijakan? dan Kedua, Apakah elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan? Dari kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi. yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1. Komunikasi (*Communication*)

Menurut Edward III dalam (Subianto, 2020:71) Komunikasi tidak semata-mata berarti "pemberian perintah", melainkan merupakan proses yang bertujuan

untuk menjamin pemahaman yang homogen dari tingkat pimpinan hingga ke birokrat tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*). Kegagalan dalam implementasi sering kali berasal dari distorsi informasi pada tahap ini. Terdapat tiga dimensi utama yang dapat memperkaya aspek komunikasi:

1. Transmisi (*Transmission*): Informasi tidak boleh terhenti pada tingkat manajerial semata. Ia harus disalurkan hingga ke pelaksana teknis. Tantangan utamanya adalah mencegah distorsi pesan saat informasi melewati berbagai lapisan hierarki organisasi (seperti efek permainan telepon).
2. Kejelasan (*Clarity*): Instruksi harus dirumuskan secara spesifik dan bebas dari ambiguitas. Bahasa hukum atau kebijakan yang "kabur" sering kali menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana, sehingga mereka enggan bertindak atau menafsirkan aturan sesuai dengan preferensi pribadi.
3. Konsistensi: Perintah yang fluktuatif atau saling bertentangan (misalnya, diperintahkan untuk bertindak cepat namun harus sangat teliti tanpa standar waktu yang jelas) akan menimbulkan kebingungan pada pelaksana dan mengurangi kredibilitas program.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber Daya menurut Edward III dalam (Tangkilisan, 2003:12) adalah faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan mencakup sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya pendukung yang memadai. Sumber

daya Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas & kualitas); informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; *Authority* (kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

a. Staff/Sumber Daya Manusia (SDM)

Insufisiensi sumber daya manusia, baik secara kuantitas (jumlah personel) maupun kualitas (kompetensi dan kapabilitas), dapat berimplikasi negatif pada proses implementasi. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan lemahnya fungsi supervisi (pengawasan) yang pada akhirnya menghambat pencapaian program. Dalam situasi di mana jumlah personel pelaksana terbatas, strategi peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan (*skill enhancement*) menjadi imperatif untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program.

b. Informasi

Informasi merupakan sumber daya vital yang terbagi dalam dua kategori utama yaitu, Informasi Prosedural, Berkaitan dengan pengetahuan teknis mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan kebijakan atau program. Informasi Kepatuhan (*Compliance*), Merujuk pada ketersediaan data pendukung yang valid untuk memastikan bahwa implementasi selaras dengan kerangka regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewenangan (Otoritas)

Kewenangan (*authority*) adalah sumber daya yuridis yang mendefinisikan batas-batas diskresi dan kontrol implementor terhadap jalannya program. Otoritas

ini mencakup kekuasaan untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran (otoritas fiskal), serta kewenangan dalam manajemen personalia, seperti rekrutmen staf dan penunjukan manajer pelaksana.

d. Fasilitas

Fasilitas merujuk pada seluruh infrastruktur fisik dan finansial yang diperlukan untuk mendukung operasionalisasi kebijakan. Komponen ini meliputi, namun tidak terbatas pada, ketersediaan ruang kantor yang layak, peralatan teknis yang relevan, serta alokasi dana (anggaran) yang memadai. Tanpa dukungan fasilitas yang esensial ini, keberlangsungan program tidak dapat dijamin.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi, atau sikap (*attitude*) yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (*implementor*), merupakan determinan krusial dalam analisis implementasi kebijakan publik. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan kebijakan sangat bergantung pada kemauan (*willingness*) dan komitmen para aparatur untuk mengeksekusi mandat yang diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada tatanan organisasi (*organizational arrangement*) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik. Desain struktur ini harus dikonfigurasi secara cermat untuk memastikan bahwa proses implementasi tidak terhambat oleh pembagian tugas atau fragmentasi yurisdiksi internal birokrasi. Edward III dalam (Tangkilisan, 2003:13) mengidentifikasi dua aspek kunci dari struktur birokrasi yang sangat memengaruhi kinerja implementasi:

a. Prosedur Operasional Baku (*Standard Operational Procedure - SOP*)

SOP, yang merupakan rutinitas dan pedoman kerja standar dalam organisasi, dapat menjadi hambatan signifikan (*significant barrier*). Hal ini terutama terjadi ketika implementasi kebijakan baru menuntut adanya alur kerja (*procedures*) atau pengerahan personel yang berbeda dari praktik yang telah mapan. Dengan demikian, semakin besar derajat perubahan prosedural yang dituntut oleh suatu kebijakan, semakin tinggi probabilitas SOP akan menghambat kelancaran pelaksanaannya.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merujuk pada kondisi di mana tanggung jawab atas suatu kebijakan tersebar atau terdistribusi di antara beberapa unit, departemen, atau agensi yang berbeda. Struktur yang terfragmentasi semacam ini secara inheren menciptakan tantangan koordinasi yang kompleks, karena keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan berbagai entitas yang terpisah untuk bekerja secara sinkron dan koheren.

2.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan konsep yang bersifat multidimensional, berlandaskan pada nilai-nilai filosofis pengembangan masyarakat, keadilan sosial, serta demokrasi partisipatif. Konsep ini

berkembang menjadi paradigma sentral dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*), dengan penekanan pada partisipasi aktif masyarakat, peningkatan kemandirian, serta keberlanjutan proses pembangunan.

Pemberdayaan menurut Adams (2003) dalam (Sani, 2019: 34), berarti cara dan metode yang digunakan individu, kelompok dan atau komunitas sehingga mereka menjadi mampu mengelola lingkungan dan mencapai tujuan mereka sendiri, dan dengan demikian mampu bekerja dan membantu satu sama lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka. Kata pemberdayaan pada medio 80-an banyak dipakai pada diskursus ketimpangan gender dan diskriminasi antar ras dan warna kulit. Pada diskursus ini pemberdayaan dimaknai sebagai upaya memberikan pembinaan kepada perempuan dan ras yang termarjinalkan. Walaupun begitu, konsep pemberdayaan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah ketimpangan gender, ras, dan suku bangsa, akan tetapi juga berkaitan dengan masalah ekonomi dan kemiskinan

Mardikanto dan Soebiato (2012:61) mengemukakan bahwa, pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk

memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan skala/upgrade utilitas dari objek yang diberdayakan.

Menurut Suharto (2005) dalam (Alfiansyah et al., 2023:4) pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya

Robert Chambers, seorang antropolog sekaligus pakar dalam bidang pembangunan partisipatif, memandang pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai sosial. Chambers (1997: 11, 13-14) menegaskan bahwa pembangunan sejati harus berorientasi dari bawah ke atas (*bottom-up*), dengan menghargai pengetahuan lokal serta memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat atas proses pembangunan mereka sendiri. Melalui pendekatan partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA), Chambers mendorong terciptanya kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat

dalam mengidentifikasi serta menganalisis kondisi mereka, baik dari sisi potensi maupun permasalahan, sehingga mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan secara mandiri. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak sekadar dimaknai sebagai kehadiran dalam forum formal, melainkan sebagai keterlibatan aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Tania et al., 2025:1)

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan pemberdayaan merupakan sebuah diskursus multidimensional yang pada awalnya muncul sebagai respons terhadap isu ketimpangan sosial, gender, dan diskriminasi ras, dimaknai sebagai upaya pembinaan terhadap kelompok yang termarginalkan. Namun, konsep ini telah meluas secara signifikan hingga mencakup dimensi ekonomi dan masalah kemiskinan. Secara singkat pemberdayaan adalah proses strategis untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan kontrol kelompok rentan agar mencapai kemandirian dan kualitas hidup yang lebih baik, melalui pendekatan yang menjunjung tinggi partisipasi dan inisiatif lokal.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Menurut Albrecht 1988 dalam (Alfiansyah et al., 2023:28-29) melakukan kegiatan pemberdayaan, hendaknya memegang teguh prinsip pemberdayaan, baik itu pemberdayaan dilakukan pada ranah individu, organisasi, dan komunitas, ataupun pemberdayaan dilakukan di desa maupun di kota. Realitasnya, memnag

banyak masyarakat yang membutuhkan pertolongan melalui pemberdayaan, walaupun mereka mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya. Untuk kesuksesan pemberdayaan tersebut, seorang fasilitator dalam pemberdayaan harus memegang prinsip kesetaraan, partisipatif, swadaya, berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas.

Kesetaraan, yaitu semua masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga dan pemangku kepentingan baik pria maupun wanita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Setara berarti sejajar atau sederajat. Dinamika yang dibangun adalah mengembangkan dan berbagi pengalaman, pengetahuan, serta keahlian masing-masing yang kemudian digunakan secara bersama. Masing-masing pihak saling menghargai dan belajar bersama.

Partisipatif, merupakan suatu dorongan mental dan emosional dari seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan mereka secara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya. Pembangunan yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat dan pembuat kebijakan (*stakeholders*) dalam menyusun rancangan program sampai pelaksanaan kegiatan. Swadaya, merupakan kekuatan sendiri.

Prinsip swadaya yaitu mengutamakan kemampuan masyarakat dan sumberdaya lokal dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat mempunyai kemampuan, keterampilan, pengetahuan tentang kendala dan masalah yang dihadapi, mengetahui keadaan lingkungannya, serta mampu bekerja secara mandiri dalam mengatasi masalahnya, karena masyarakat mempunyai kemauan, tenaga

kerja dan budaya yang sudah lama dipatuhi. Hal ini harus diimplementasikan dan dijadikan modal dasar untuk proses pemberdayaan. Bantuan dari pihak lain yang bersifat materil hanya dijadikan penunjang bukan sebagai prioritas.

Berkelanjutan, kegiatan pemberdayaan didesain untuk terus berjalan, meskipun awalnya kedudukan atau peran pendamping lebih berpengaruh dibanding masyarakat, akan tetapi secara perlahan, peran pendamping akan semakin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah bisa mengelola kegiatannya sendiri. Akuntabilitas merupakan prinsip pemberdayaan yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam pemberdayaan, seorang fasilitator hendaknya memperhatikan sikap akuntabilitas dalam melaksanakan tugasnya seperti: 1) akuntabilitas sebuah hubungan, 2) akuntabilitas berorientasi pada hasil, 3) akuntabilitas adanya laporan, 4) akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta 5) akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional); ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

2.2.3 Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai dimensi kehidupan yang saling terhubung dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kolektif. Menurut Ndraha 2003 dalam (Efendi et al., 2021:4) menentukan bahwa lingkup pemberdayaan masyarakat terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang: politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

1. Pemberdayaan bidang politik

Pemberdayaan dalam ranah politik diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat ketika berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta yang memiliki agenda atau proyek di wilayah masyarakat. Posisi tawar ini krusial agar masyarakat tidak berada dalam posisi subordinat di hadapan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pemberdayaan bidang ekonomi

Di bidang ekonomi, pemberdayaan umumnya berkaitan dengan pencapaian kemandirian dalam kehidupan masyarakat, dengan fokus pada upaya-upaya produktif yang dapat menjadi sumber pendapatan atau mata pencaharian utama.

3. Pemberdayaan bidang sosial

Pemberdayaan di lingkup sosial budaya melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, yang mencakup penguatan solidaritas sosial, pengurangan kerentanan terhadap konflik, serta pengembangan solidaritas. Dalam konteks ini, pemberdayaan juga mencakup

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pluralitas sosial, termasuk aspek etnis, kepercayaan atau agama, serta status sosial.

4. Pemberdayaan bidang lingkungan

Pemberdayaan di bidang lingkungan menekankan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga keberlanjutannya. Upaya-upaya tersebut hanya dapat terwujud jika masyarakat memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan serta keberlanjutannya, yang dapat dikembangkan melalui inisiatif pemberdayaan.

2.3 Konsep Desa Mandiri

2.3.1 Definisi Desa Mandiri

Konsep Desa Mandiri merupakan gagasan strategis dalam kerangka pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan desa sebagai entitas yang memiliki kemandirian secara ekonomi, sosial, dan ekologis. Secara operasional, definisi desa mandiri mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam konteks tersebut, desa mandiri atau disebut juga desa semesta merupakan desa yang telah mencapai tingkat kemajuan tinggi dengan kemampuan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi (Isakh et al., 2022:384).

Desa mandiri dapat dipahami sebagai satuan wilayah yang memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, mengelola potensi sumber daya lokal secara efektif, dan memberikan pelayanan publik yang memadai tanpa ketergantungan signifikan terhadap bantuan eksternal. Kemandirian tersebut mencakup berbagai dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sehingga desa tidak hanya tumbuh secara material, tetapi juga membentuk komunitas yang kuat, berdaya, serta harmonis dengan lingkungan alamnya. Desa mandiri ditandai oleh kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai, serta kemampuan menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya membangun ketahanan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan (Muallif, 2024).

a. Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai Instrumen Pengukuran

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah instrumen komposit dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. Berlandaskan paradigma pembangunan berkelanjutan dengan pilar sosial, ekonomi, dan ekologi, IDM menekankan prakarsa lokal, partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Hasil IDM berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pemerintah di semua tingkatan, digunakan untuk menentukan kebijakan, alokasi anggaran, dan strategi intervensi pembangunan desa. IDM juga

menjadi acuan bagi pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan desa (Isakh et al., 2022:386).

Berdasarkan konteks kebijakan fiskal, IDM juga berperan sebagai dasar penetapan alokasi Dana Desa oleh Kementerian Keuangan, melalui Alokasi Afirmasi bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal sebesar 1% serta Alokasi Kinerja bagi desa berkembang, maju, dan mandiri sebesar 4% dari total Dana Desa, sesuai dengan indikator capaian kemandirian desa.

b. Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Berdasarkan hasil pengukuran *Indeks Desa Membangun (IDM)*, desa-desa di Indonesia dikategorikan ke dalam lima tingkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Klasifikasi ini didasarkan pada nilai indeks komposit yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata dari tiga dimensi utama, yaitu *Indeks Ketahanan Sosial (IKS)*, *Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)*, dan *Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)*. Secara matematis, nilai IDM dirumuskan sebagai: $IDM = 1/3 (IKS + IKE + IKL)$.

Rumus tersebut menggambarkan pendekatan komprehensif dalam menilai tingkat kemajuan suatu desa, di mana keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi dasar penentuan tingkat kemandirian desa. Melalui metode ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas pembangunan desa sekaligus mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan yang tepat untuk mendorong percepatan desa menuju status yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Akbar, 2023).

1. Desa Mandiri (Desa Sembada), ditandai dengan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang melebihi 0,815 ($IDM > 0,815$). Kategori ini menggambarkan keberhasilan pembangunan desa yang memiliki kapasitas tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkesinambungan.
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada), memiliki nilai IDM antara 0,707 hingga 0,815 ($0,707 < IDM \leq 0,815$). Desa dengan klasifikasi ini menunjukkan potensi yang kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi, serta telah mampu mengelola potensi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Desa Berkembang (Desa Madya), berada pada rentang nilai IDM 0,599 hingga 0,707 ($0,599 < IDM \leq 0,707$). Desa ini memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang cukup memadai, namun pemanfaatannya belum maksimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.
4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya), memiliki nilai IDM antara 0,491 hingga 0,599 ($0,491 < IDM \leq 0,599$). Desa dalam kategori ini masih mengalami berbagai hambatan dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama), diklasifikasikan dengan nilai IDM kurang dari atau sama dengan 0,491 ($IDM \leq 0,491$). Desa pada kategori ini menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam,

guncangan ekonomi, serta konflik sosial akibat terbatasnya kemampuan dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Klasifikasi berdasarkan nilai IDM tersebut menjadi acuan strategis bagi pemerintah dalam menentukan prioritas dan arah intervensi pembangunan desa, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan di desa tertinggal dan sangat tertinggal.

2.3.2 Indikator Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun (IDM) mencakup tiga dimensi utama yang saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang terpadu dalam menilai tingkat kemajuan serta kemandirian desa, yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi atau lingkungan. Ketiga dimensi tersebut berperan sebagai kerangka konseptual yang komprehensif dalam mengukur kemampuan desa untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta bertransformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan (Wahyu Saputra & Jaya, 2023:22).

A. Dimensi Sosial (Indeks Ketahanan Sosial/IKS)

Dimensi sosial atau *Indeks Ketahanan Sosial (IKS)* merefleksikan tingkat kekuatan, stabilitas, dan kohesi struktur sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat desa. Dimensi ini mengukur kemampuan komunitas dalam membangun interaksi sosial yang harmonis, beradaptasi terhadap perubahan, serta bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. IKS berfungsi sebagai

instrumen analitis untuk menilai kondisi sosial masyarakat desa, yang meliputi aspek solidaritas, kesehatan, pendidikan, dan permukiman sebagai indikator utama kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

1. Dimensi Modal Sosial, menunjukkan kualitas relasi sosial antarindividu dan kelompok dalam masyarakat yang terbentuk melalui nilai-nilai kebersamaan, rasa saling percaya, dan semangat gotong royong. Unsur seperti toleransi antarwarga, rasa aman, serta kepedulian sosial berperan sebagai indikator kunci dalam mengukur kekuatan modal sosial di tingkat desa. Modal sosial berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kohesi sosial dan menciptakan lingkungan partisipatif yang mendorong kerja sama kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Keberadaan modal sosial yang kuat memperkuat jejaring sosial, meningkatkan kepercayaan antarwarga, dan memperbesar efektivitas pelaksanaan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
2. Dimensi Kesehatan, menggambarkan tingkat kesejahteraan fisik masyarakat desa melalui pengukuran aksesibilitas dan mutu layanan kesehatan. Keberadaan fasilitas seperti rumah sakit, puskesmas, poskesdes, dan polindes, serta ketersediaan tenaga kesehatan profesional, menjadi indikator penting dalam dimensi ini. Kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan.

3. Dimensi Pendidikan, mengukur tingkat aksesibilitas, partisipasi, dan kualitas pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat desa. Ketersediaan sarana pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non-formal seperti PAUD dan pelatihan keterampilan, menjadi komponen penting dalam penilaian dimensi ini. Tingkat pendidikan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial maupun ekonomi. Desa yang menyediakan pendidikan yang merata dan inklusif berpotensi membentuk masyarakat yang berpengetahuan, kritis, serta aktif berpartisipasi dalam setiap tahap pembangunan.
4. Dimensi Permukiman, mencerminkan kondisi infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat desa. Akses terhadap air bersih, sanitasi layak, jaringan listrik, serta fasilitas komunikasi dan informasi menjadi indikator utama dalam menilai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

B. Dimensi Ekonomi (Indeks Ketahanan Ekonomi/IKE)

Dimensi ekonomi atau *Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)* merepresentasikan kemampuan suatu desa dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan ekonomi masyarakatnya di tengah dinamika perubahan dan tekanan ekonomi yang terus berkembang. Dimensi ini menekankan sejauh mana desa mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Selain itu, dimensi ini mencerminkan kapasitas desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, memperkuat struktur ekonomi yang inklusif, serta membangun sistem ekonomi

yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan global maupun lokal. Dengan demikian, IKE tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai indikator kemandirian desa dalam menciptakan diversifikasi usaha, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengelola sumber daya ekonomi secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan desa yang mandiri dan resilien (Sumber: <https://www.desahunuth.id/>)

1. Keragaman Produksi Masyarakat Desa, merefleksikan tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di suatu wilayah pedesaan, meliputi sektor pertanian, perdagangan, jasa, serta industri rumah tangga. Keberadaan berbagai jenis aktivitas ekonomi tersebut menunjukkan tingkat keberagaman ekonomi lokal yang berfungsi sebagai penopang ketahanan desa terhadap gejolak ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas maupun perubahan dinamika pasar. Diversifikasi ekonomi tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas pendapatan masyarakat, tetapi juga mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan basis ekonomi desa secara berkelanjutan.
2. Pusat Pelayanan Perdagangan, menggambarkan kapasitas desa dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi yang menunjang kegiatan perdagangan masyarakat. Indikator ini meliputi ketersediaan fasilitas ekonomi seperti kedai makanan, restoran, hotel atau penginapan, serta akses masyarakat terhadap pasar tradisional, pertokoan, dan pusat perdagangan baik permanen

maupun semi permanen. Keberadaan sektor perdagangan di lingkungan permukiman seperti warung dan minimarket menunjukkan adanya dinamika ekonomi lokal yang aktif serta kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah luar.

3. Akses Distribusi dan Logistik, menunjukkan sejauh mana desa memiliki sistem infrastruktur dan layanan penunjang mobilitas barang serta jasa. Keberadaan kantor pos dan penyedia layanan logistik menjadi komponen strategis dalam memperlancar aliran distribusi hasil produksi lokal menuju pasar yang lebih luas. Akses logistik yang memadai berkontribusi pada penguatan konektivitas desa dengan pusat-pusat ekonomi di tingkat regional, peningkatan efisiensi kegiatan perdagangan, serta perluasan kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah pedesaan.
4. Akses terhadap Lembaga Keuangan dan Perkreditan, menggambarkan kemampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan layanan keuangan formal maupun non-formal. Indikatornya mencakup keberadaan lembaga perbankan umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi yang berperan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan dan kredit usaha.
5. Keterbukaan Wilayah, merepresentasikan tingkat aksesibilitas dan keterhubungan desa terhadap jaringan transportasi dan mobilitas penduduk. Indikator ini mencakup ketersediaan moda transportasi umum dengan trayek

yang teratur, waktu operasional yang memadai, serta kondisi infrastruktur jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor sepanjang tahun. Tingkat keterbukaan wilayah yang baik tidak hanya memperlancar pergerakan barang dan jasa, tetapi juga memperkuat interaksi sosial dan ekonomi antara desa dengan wilayah sekitarnya. Aksesibilitas yang optimal berperan penting dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi, meningkatkan efisiensi logistik, serta mengintegrasikan desa ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas dan berdaya saing.

C. Dimensi Ekologi/Lingkungan (Indeks Ketahanan Lingkungan/IKL)

Dimensi ekologi atau *Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)* merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana desa mampu mengelola wilayahnya secara terpadu dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. Dimensi ini menilai kemampuan desa dalam mengintegrasikan aspek tata kelola, produksi, dan konsumsi yang ramah lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Penguatan ketahanan lingkungan menjadi bagian integral dari pembangunan desa berkelanjutan, karena kualitas lingkungan yang baik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat desa. IKL terdiri atas dua indikator utama, yaitu kualitas lingkungan dan potensi serta ketangguhan terhadap bencana alam, yang secara bersama-sama menggambarkan tingkat kesadaran,

kemampuan mitigasi, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan (Hendriawan & Marlina, 2025:36).

1. **Kualitas Lingkungan,** Kualitas lingkungan menggambarkan kondisi ekologis desa yang berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya alam serta kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Indikator ini mengukur tingkat pencemaran air, tanah, dan udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alam, termasuk keberadaan sungai yang tercemar limbah rumah tangga, pertanian, atau industri kecil. Pengelolaan sampah yang efektif melalui sistem pemilahan, daur ulang, dan pengurangan limbah menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas lingkungan. Desa dengan kualitas lingkungan yang baik menunjukkan tingkat kesadaran ekologis yang tinggi, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta keberhasilan penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.
2. **Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana,** Potensi rawan bencana dan tanggap bencana mencerminkan kemampuan desa dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, serta merespons berbagai ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, atau kekeringan. Indikator ini menilai tidak hanya keberadaan potensi risiko bencana, tetapi juga kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam melakukan mitigasi serta penanganan darurat. Pembentukan satuan tugas penanggulangan bencana, penyediaan jalur evakuasi, dan pelaksanaan pelatihan tanggap darurat menjadi bagian penting dari strategi adaptif desa terhadap bencana. Kesiapsiagaan masyarakat merupakan kunci

dalam menciptakan sistem perlindungan yang tangguh, di mana kesadaran kolektif dan pengetahuan lokal digunakan untuk memperkuat ketahanan desa terhadap dampak perubahan iklim dan kejadian ekstrem. Desa yang memiliki sistem tanggap bencana yang baik tidak hanya mampu meminimalkan kerugian material dan korban jiwa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kapasitas adaptif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kehidupan desa.

2.4 Konsep UMKM dan Ekonomi Desa

2.4.1 Definisi Dan Kriteria UMKM di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan nasional. Secara yuridis, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi dan kategori UMKM di Indonesia (Yazfinfinezi, 2018:38).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) , usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau entitas usaha perorangan, dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak mencakup lahan dan bangunan lokasi operasional, atau pendapatan penjualan

tahunan maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil merujuk pada kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, dijalankan oleh individu atau entitas usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, dengan kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000,- hingga maksimal Rp500.000.000,-, tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan penjualan tahunan melebihi Rp300.000.000,- hingga maksimal Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, usaha menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, dioperasikan oleh individu atau entitas usaha, dengan kekayaan bersih melebihi Rp500.000.000,- hingga maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak mencakup lahan dan bangunan lokasi usaha, atau pendapatan penjualan tahunan melebihi Rp2.500.000.000,- hingga maksimal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) sebagai instrumen pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini merevisi parameter usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyesuaian angka nominal yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Menurut PP 7/2021, usaha mikro yang didirikan setelah berlakunya peraturan ini memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), tidak mencakup lahan dan bangunan lokasi

operasional, atau bagi usaha yang telah beroperasi sebelumnya, pendapatan penjualan tahunan maksimal Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Usaha kecil ditetapkan dengan modal usaha melebihi Rp1.000.000.000,- hingga maksimal Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tidak termasuk lahan dan bangunan tempat usaha, atau pendapatan penjualan tahunan melebihi Rp2.000.000.000,- hingga maksimal Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). Adapun usaha menengah memiliki modal usaha melebihi Rp5.000.000.000,- hingga maksimal Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), tidak mencakup lahan dan bangunan lokasi usaha, atau pendapatan penjualan tahunan melebihi Rp15.000.000.000,- hingga maksimal Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Di samping parameter modal dan omzet, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan kategorisasi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, yakni usaha kecil yang melibatkan 5 hingga 19 orang pekerja, sementara usaha menengah mencakup 20 hingga 99 orang pekerja. Pendekatan klasifikasi ini menawarkan wawasan tambahan untuk menganalisis dimensi serta kemampuan operasional usaha mikro, kecil, dan menengah dalam hal penyerapan tenaga kerja serta kontribusinya terhadap dinamika ekonomi regional (Nabila, 2024).

2.4.2 Peran Strategis UMKM Dalam Perekonomian Desa Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian Indonesia, terutama dalam memperkuat ekonomi perdesaan dan menyerap tenaga kerja secara nasional. Sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi, UMKM berkontribusi antara 60,5% hingga 61% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau sekitar Rp9.580 triliun berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem ekonomi nasional, tetapi juga merupakan motor penggerak utama yang menciptakan nilai tambah ekonomi lintas sektor dan wilayah, khususnya di daerah pedesaan yang menjadi basis kegiatan produktif masyarakat (Pane et al., 2025:125).

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, UMKM menunjukkan kapasitas yang sangat besar dengan menyerap sekitar 96,9% hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, atau lebih dari 117 juta orang pekerja. Kemampuan ini menegaskan peran UMKM sebagai instrumen penting dalam penanggulangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan yang tinggal di daerah tertinggal. Fleksibilitas UMKM memungkinkan sektor ini menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan dan keterampilan, termasuk mereka yang memiliki kompetensi terbatas. Misalnya, sektor UMKM di bidang kuliner, kerajinan, maupun jasa lokal sering kali mengandalkan tenaga kerja

setempat, sehingga turut mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat komunitas.

Peran UMKM dalam konteks ekonomi pedesaan juga sangat krusial mengingat persebarannya yang luas hingga ke wilayah terpencil. Keberadaan UMKM berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Melalui kegiatan produksi berbasis potensi lokal, UMKM membantu menggerakkan perekonomian daerah, menekan laju urbanisasi, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat. Selain itu, ketergantungan UMKM terhadap sumber daya lokal menjadikannya lebih tahan terhadap fluktuasi global, sekaligus membuka peluang untuk menembus pasar ekspor yang dapat menambah devisa negara. Dengan demikian, UMKM menjadi salah satu pilar utama ketahanan ekonomi nasional yang tetap mampu bertahan dan beroperasi secara produktif bahkan di tengah situasi krisis ekonomi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/judul/tahun	Metode dan teori	Hasil penelitian	Pebedaan dan persamaan
1.	(Ningsih, 2023), Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid 19	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program bantuan BPUM	Penelitian tersebut berfokus pada Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan program stimulus/darurat

No	Peneliti/judul/tahun	Metode dan teori	Hasil penelitian	Pembedaan dan persamaan
	Di Kantor Camat Medan Kota	deskriptif dan teori implementasi menurut Edward III..	di Kecamatan Medan Kota sudah berjalan cukup baik untuk mengembangkan UMKM di masa Covid-19. Dari segi komunikasi, kecamatan medan kota sudah memberikan sosialisasi dan informasi tentang bantuan usaha mikro.	dan berlokasi di Kantor Camat Medan Kota (wilayah perkotaan). Kontras ini sangat kuat dengan penelitian saya yang fokus pada program pemberdayaan jangka panjang untuk mencapai Desa Mandiri di wilayah Desa Tanjung Purba.
2.	(Suherman & Rohaeni, 2023), Efektivitas Program Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Mekar Bersatu Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)	Metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan teori yang digunakan adalah teori efektivitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa mandiri di Desa Mekar Bersatu, Kabupaten Lombok Tengah, cukup efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih perlu dimaksimalkan karena adanya faktor penghambat dari pihak pemberdaya dan pemberdaya	Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas dan outcome (kesejahteraan) di Lombok Tengah; Tidak mengkaji proses implementasi di kabupaten Deli Serdang dan faktor penghambat digitalisasi UMKM.

No	Peneliti/judul/tahun	Metode dan teori	Hasil penelitian	Pembedaan dan persamaan
			yang membuatnya belum sepenuhnya berjalan.	
3.	(Rahmawati, 2018), Implementasi Program Inovasi Desa (PID) Di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.	Metode penelien deskriptif kualitatif, dan teori van meter dan van horn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PID berjalan baik namun masih terkendala koordinasi dan kapasitas SDM pelaksana di tingkat desa.	Penelitian ini fokus pada implementasi program yang luas (PID); Tidak memfokuskan isu kesenjangan digital secara spesifik pada pemasaran produk UMKM sebagai variabel penghambat implementasi sentral.
4.	(Sipayung, 2013)Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang	Metode penelitian kuantitatif dan teori efektivitas	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi masyarakat, namun terkendala transparansi dan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan.	Penelitian ini fokus pada Pengelolaan Dana Desa (aspek finansial/manajemen) tetapi tidak mengkaji proses implementasi program spesifik UMKM dan barrier digitalisasi di Deli Serdang.
5.	(Fachri et al., 2025) Efektivitas	Metode kualitatif	Hasil penelitian tersebut	Penelitian ini berfokus pada

No	Peneliti/judul/tahun	Metode dan teori	Hasil penelitian	Pebedaan dan persamaan
	Program Pendampingan Usaha Mikro di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung.	dan teori analisis data model interaktif Miles & Huberman	menunjukkan efektivitas program pendampingan masih terbatas pada peningkatan pengetahuan, belum optimal dalam peningkatan omset dan akses pasar, terutama karena fokus pada wilayah perkotaan (Bandung).	efektivitas (<i>output</i>) di wilayah Kota (urban); Tidak mengkaji proses implementasi dengan model implemetasi Edwards III di tingkat desa dan tidak secara mendalam membahas kesenjangan digital sebagai penghambat sentral.

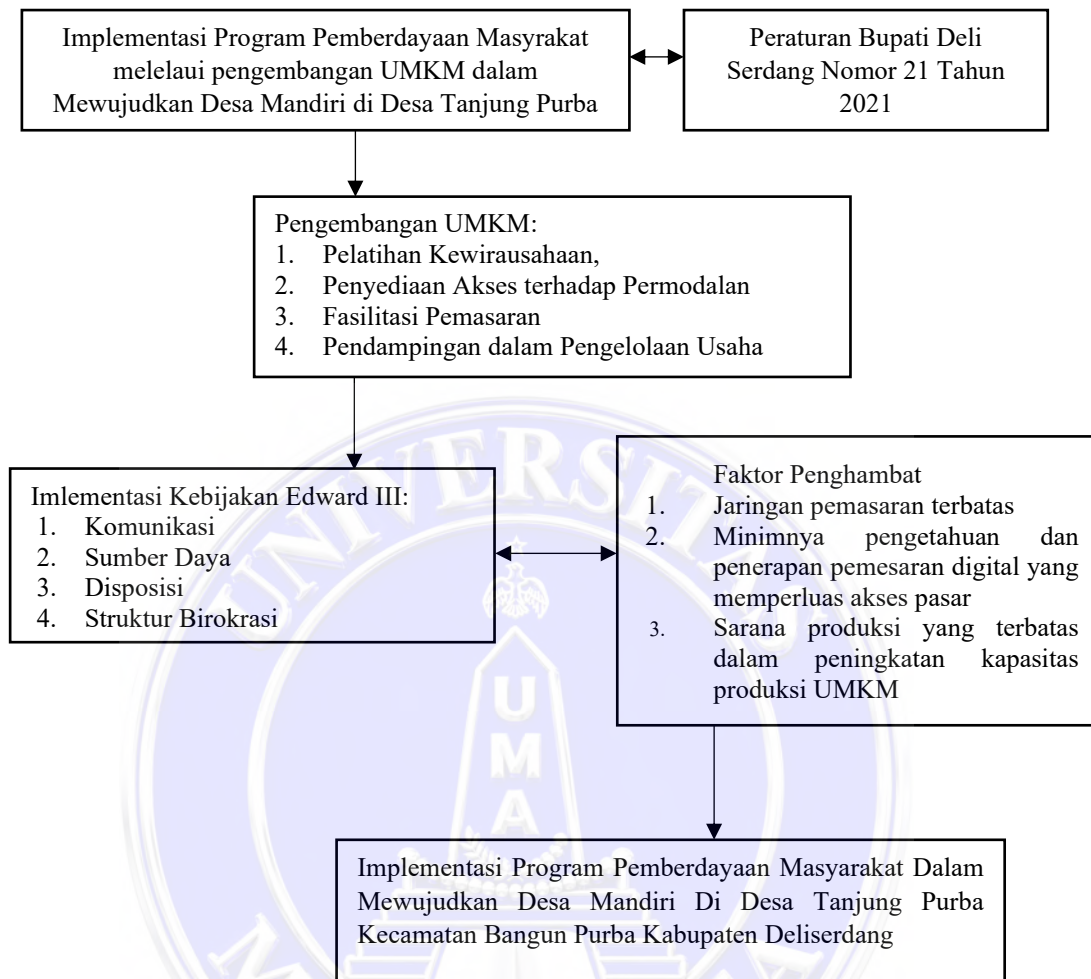
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

2.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:29) kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian yang akan di teliti mengenai “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan UMKM dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deliserdang”.

Kerangka berpikir pada gambar tersebut menggambarkan bahwa penelitian ini berangkat dari Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2021 sebagai

landasan kebijakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM guna mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Purba. Implementasi program tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses permodalan, fasilitasi pemasaran, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya, proses implementasi kebijakan dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain terbatasnya jaringan pemasaran, rendahnya pengetahuan dan penerapan pemasaran digital oleh pelaku UMKM, serta keterbatasan sarana produksi yang memengaruhi peningkatan kapasitas usaha. Interaksi antara implementasi kebijakan dan faktor penghambat tersebut kemudian menentukan sejauh mana program pemberdayaan masyarakat mampu mendukung terwujudnya desa mandiri di Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1), penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek dalam kondisi alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menggambarkan kondisi apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Melalui penelitian kualitatif, maka peneliti akan memperoleh data yang ada di lapangan untuk dianalisis lebih mendalam secara rinci dan detail. Hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif nantinya memungkinkan untuk dapat menggantikan teori lama karena berdasarkan hasil yang diperoleh dari lapangan atau memungkinkan dari hasil penelitian kualitatif dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai landasan dalam penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau wilayah proses penelitian dilaksanakan.

Lokasi yang diambil oleh penulis adalah Kantor Kepala Desa Tanjung Purba Kecamatan bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di Kantor Kepala Desa Tanjung Purba Kecamatan bangun, ialah:

Tabel 2. Waktu Penelitian									
No	Uraian Kegiatan	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
1	Pengajuan judul								
2	Penyusunan prorsal								
3	Seminar proposal								
4	Perbaikan proposal								
5	Penelitian								
6	Penyusunan skripsi								
7	Seminar hasil								
8	Perbaikan skripsi								
9.	Sidang								

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

3.3 Informan/Narasumber

Menurut Sugiono (2014:56) Informan atau narasumber dalam penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nanti akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan tersebut didasarkan pada kemampuan informan dalam menyampaikan informasi yang relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian.

1. Menurut (Ade Heryana, S.St, 2016:4) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam proses investigasi, akan dilakukan wawancara terhadap informan yang terkait dan hasil wawancara akan dicatat. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Kepala Desa Tanjung Purba yang bertanggung jawab penuh atas program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan. Beliau menjadi penentu dalam mengidentifikasi tantangan dan inisiatif lokal.
2. Menurut (Ade Heryana, S.St, 2016:6) Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan

demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini informan utama yaitu Sekretaris Desa/Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) dan Pelaku UMKM yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba sebagai pelaksana teknis di desa yang bertanggung jawab memastikan komunikasi dan alokasi sumber daya program berjalan sesuai rencana. Mereka memberikan data detail mengenai Struktur Birokrasi dan kendala harian.

3. Menurut (Ade Heryana, S.St, 2016:6) Informan Tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Dalam penelitian ini informan tambahan yaitu 5 orang masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM merupakan rekomendasi dari pihak desa dari setiap dusun yang ada di Desa Tanjung Purba. penambahan 5 informan tersebut bertujuan untuk memperdalam analisis, memastikan kelengkapan data, dan meningkatkan validitas hasil penelitian mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Jenis informan	Jumlah	Nama	Jabatan
1.	Informan kunci	1	Tebe Holo Purba S.P	Kepala Desa
2.	Informan utama	1	Nurul Azizah S.E	Sekretaris Desa
3.	Informan tambahan	5	• Sri Hariati • Zulkifli Lubis • Sugito • Suripah • Cristine	Masyarakat pelaku UMKM Desa Tanjung purba

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data dari sumber penelitian. Menurut Sugiyono (2018:110) menegaskan bahwa pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan bahan penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian. Teknik pengumpulan data harus dipilih dengan cermat agar instrumen yang disusun valid dan dapat mengukur aspek-aspek yang diteliti secara tepat. Di dalam sebuah penelitian pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan. Teknik pengumpulan data yang benar

akan menghasilkan data yang memiliki integritas tinggi, dan sebaliknya. Maka dari itu, teknik pengumpulan data tidak boleh keliru dan harus dilakukan dengan cermat.

Teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian atau fenomena sosial di lapangan menggunakan pancaindra, terutama penglihatan (Moleong, 2015:174). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara nyata bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Desa Tanjung Purba. Peneliti melakukan observasi partisipatif, yaitu mengamati langsung dan berkomunikasi dengan perangkat desa dan masyarakat pelaku UMKM mengenai kegiatan masyarakat dan program pemberdayaan seperti pelatihan usaha mikro, gotong royong, serta kegiatan ekonomi produktif desa. Melalui observasi, peneliti dapat memahami dinamika sosial, interaksi antaraktor, serta hambatan dan peluang yang muncul dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hasil observasi ini sangat penting untuk melengkapi data hasil wawancara, karena memberikan gambaran empiris tentang bagaimana Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Moleong, 2015:174). Dalam konteks penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana proses implementasi program pemberdayaan masyarakat berlangsung di Desa Tanjung Purba, serta sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam mewujudkan desa mandiri. Peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur agar tetap memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara bebas dan mendalam. Jenis wawancara ini dianggap paling sesuai karena dapat menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang memiliki pengalaman dan cara pandang beragam pada program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala Desa, Sekretaris Desa/Kasi PMD, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat program. Melalui wawancara, peneliti berupaya menggali data tentang persepsi, kendala, strategi, dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti laporan kegiatan, arsip pemerintahan desa, data statistik, foto, maupun catatan administratif yang relevan dengan topik penelitian (Moleong, 2015:176). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba. Dokumen yang dikaji meliputi profil desa, rekap data masyarakat pelaku UMKM desa, serta berbagai bentuk publikasi atau arsip kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Data dokumentatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan verifikasi terhadap hasil wawancara dan observasi, tetapi juga memberikan konteks historis mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di desa tersebut. Dengan demikian, dokumentasi menjadi sumber data sekunder yang memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dalam mewujudkan desa mandiri.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk mengorganisir, mereduksi, serta menafsirkan data menjadi informasi yang bermakna untuk memahami fenomena yang diteliti secara

mendalam. Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi guna mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh agar dapat tersebut mudah dipahami. (Moleong, 2015:245).

Tujuan teknik analisis data adalah untuk menentukan atau mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan yang didapatkan dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berlanjut hingga tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman (2010), teknik analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan awal dalam proses analisis data kualitatif yang berfungsi untuk menyederhanakan, mengorganisasi, dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumentasi biasanya sangat beragam dan kompleks. Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses reduksi untuk menyeleksi informasi yang berkaitan langsung dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba. Dalam penelitian ini, kegiatan reduksi dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mengklasifikasikan data sesuai dengan empat indikator dalam Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM, hambatan yang dihadapi, serta upaya pemerintah desa dalam mendorong kemandirian masyarakat akan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, data yang dianggap tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan. Dengan demikian, tahap reduksi berperan penting dalam merangkum temuan lapangan menjadi informasi yang lebih terarah, bermakna, dan mampu menggambarkan secara jelas implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan berikutnya setelah proses reduksi, di mana data yang telah diseleksi kemudian diorganisasi dan disusun secara sistematis agar dapat dianalisis serta dipahami dengan mudah. Menurut Miles dan Huberman (1994), penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian naratif, matriks, tabel, atau bagan yang memperlihatkan hubungan antar kategori. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan tematik yang menampilkan hasil temuan lapangan mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba. Data hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan penerima program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM, yang akan

disajikan secara sistematis berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut Edwards III. Misalnya, pada aspek komunikasi, data akan menggambarkan bagaimana informasi program disosialisasikan kepada masyarakat; pada aspek sumber daya, data akan menyoroti ketersediaan tenaga pelaksana, pendanaan, serta sarana pendukung; aspek disposisi akan menjelaskan sikap, komitmen, dan motivasi aparat pelaksana; sedangkan struktur birokrasi akan memperlihatkan mekanisme kerja dan prosedur pelaksanaan program. Selain itu, penyajian data juga akan diperkuat dengan hasil observasi dan dokumentasi, seperti notulensi kegiatan, foto lapangan, serta laporan program pemberdayaan. Penyusunan data yang sistematis ini bertujuan agar pembaca memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM bagi terwujudnya desa mandiri di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini bertujuan untuk menemukan makna, pola hubungan, serta keterkaitan antarfenomena yang muncul selama penelitian. Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara berkesinambungan (*continuous process*), dimulai sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir. Kesimpulan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba dilaksanakan serta

sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian desa. Peneliti mengidentifikasi pola-pola keberhasilan, hambatan, serta faktor pendukung dalam setiap aspek implementasi berdasarkan teori Edwards III.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, secara umum telah berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal pada setiap indikator implementasi kebijakan menurut model George C. Edwards III. Pada indikator komunikasi, pemerintah desa telah melaksanakan proses penyampaian informasi program secara terstruktur, sistematis, dan berjenjang melalui perangkat desa hingga kepada masyarakat pelaku UMKM. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman sebagian besar masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya pemahaman masyarakat akibat keterbatasan literasi serta teknik sosialisasi yang belum sepenuhnya efektif, sehingga menimbulkan potensi miskomunikasi dalam pelaksanaan program. Indikator sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan yang relatif memadai, termasuk kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM. Ketersediaan fasilitas pelatihan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan produksi menunjukkan

adanya komitmen dalam mendukung pengembangan UMKM. Namun, dalam implementasinya masih terdapat keterbatasan pada aspek pemerataan bantuan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sehingga efektivitas program belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Indikator disposisi, aparat pemerintah desa menunjukkan sikap yang positif, komitmen tinggi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program serta upaya pendampingan kepada pelaku UMKM. Meskipun demikian, keberhasilan program masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi sebagian masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap tujuan program, sehingga diperlukan penguatan sinergi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh mekanisme kerja yang relatif jelas dan pembagian tugas yang terstruktur dalam pemerintahan desa. Prosedur administrasi yang sederhana serta adanya pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi bentuk konkret dukungan birokrasi terhadap pengembangan UMKM. Namun, koordinasi antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi hambatan administratif dan untuk memastikan efektivitas implementasi program secara menyeluruh.

2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM di Desa Tanjung Purba meliputi informasi yang kurang jelas, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana program, rendahnya literasi digital pelaku UMKM, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung produksi dan pemasaran, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan dan anggaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, efektivitas komunikasi, serta konsistensi pendampingan dalam jangka panjang.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Purba perlu memperkuat kualitas implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan meningkatkan intensitas dan konsistensi pendampingan usaha secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas pelaku UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan penguasaan pemasaran digital agar pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Optimalisasi peran aparatur desa dan lembaga pendamping perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber

daya manusia agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala perlu diterapkan guna memastikan bahwa program pemberdayaan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Purba dan Pemerintah Daerah Deli Serdang disarankan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi program dengan memperbaiki koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengembangan UMKM. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi serta fasilitas pemasaran perlu ditingkatkan agar pelaku UMKM memiliki dukungan yang memadai dalam mengembangkan usahanya. Peningkatan literasi digital masyarakat desa perlu menjadi prioritas melalui pelatihan yang bersifat praktis dan aplikatif agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Penguatan jaringan pemasaran dan kemitraan usaha perlu dikembangkan dengan melibatkan pihak swasta, koperasi, dan platform digital guna memperluas peluang usaha serta mengurangi ketergantungan pada pasar lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdubrohim, dkk. (2023). *Pengertian dan konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pt Global Eksekutif Teknologi, Padang, Sumatera Barat.
- Bahartiar, B. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Prosedur Analisis (2020)*. Cetakan Pertama. Badan Penerbit UNM, Makassar, Indonesia.
- Efendi, : Moh. Yusuf, Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifat, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., Astuti, R., Sutarman, Saptaria, L., Setyawan, W. H., & Nurhidayah, R. E. (2021). *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Polije pres, Jember.
- Jumroh, D. D. (2021). *Implemetasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*. Solok, Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta . hlm. 10-12.
- Mardikanto T dan Poerwoko S, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sobirin, S. S. (2023). *Implementasi Kebijakan (Studi Kasus, Teori dan Aplikasinya)*. Chakti Pustaka Indonesia.
- Subianto, Dr.Agus, M. S. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya; Brilliant
- Sugiyono. (2014). *Populasi dan sampel: Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Bandung ;Refika Aditama.

Tangkilisan, D. H. nogi s M. S. (2003). *implemetasi kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lumkan Offser; Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) 2003

Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal/Skripsi

Ade Heryana. (2016). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas esa unggul, Jakarta.

Amiruddin. (2018). *Kebijakan daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Makassar.

Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724–739.

Cahyaningrum, W., Syahrani, S., Juliana, A., & Hasyim, B. (2025). Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di Desa Wisata Pulau Sapi: Kolaborasi mahasiswa KKN dan komunitas. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(3), 2174–2182.

Dianti, Y. (2024). Model-model implementasi kebijakan publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Fachri, M., Nurhidayat, F., & Arifin, R. H. B. (2025). Efektivitas program pendampingan usaha mikro di Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung.

Ferdiansyah, D., Nadhifah, S., Ramadhani, V. A., & Komarudin, R. E. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui rutinitas sosial di Desa Sukarapih dalam program KKN. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 81–92.

Fitriana, R., Fauziyatul H, N., Azrni, S., Naufal, M., Zahro, A., Astuti, D., & Mardiana, S. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi dan inovasi produk. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 7(1), 2654–2544.

- Fuadi, H. (2021). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan kearifan lokal. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 63–67.
- Hapiz, M., Septia, L. P., Aprilianti, D., Aprilianto, D., Maulida, I., Muhammad, F., Shaafia, A., Hilman Maulana, M., & Herdiana, D. (2025). Analisis kebijakan pengembangan UMKM digital di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 36–44.
- Hasanah, N., Ravico, R., Bustami, B., Rimin, R., Siregar, A. D., & Yati, R. M. (2025). Optimalisasi potensi lokal: Pemberdayaan berbasis ekonomi, sosial dan pendidikan. *Rangguk: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 9–18.
- Hendriawan, M. R., & Marlina, R. R. (2025). Pengelompokan desa di Jawa Barat berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) menggunakan algoritma CLARA. *Jambura Journal of Probability and Statistics*, 6(1), 35–41.
- Isakh, I. H., Muhafidin, D., & Halimah, M. (2022). Kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan Indeks Desa Membangun. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 13(2), 384–390.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan Terminal Tatelu. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Namirah, S. A., & Ruwaida, I. (2023). Pemberdayaan politik perempuan desa dan peran organisasi masyarakat sipil. *Jurnal Perempuan*, 28(2), 101–115.
- Ningsih, D. A. (2023). *Implementasi kebijakan bantuan produktif usaha mikro pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Camat Medan Kota* (Skripsi). Universitas Medan Area.
- Nur Isnaini, R., Yuliati, N., Ariefianto, L., & Irfan Hilmi, M. (2023). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui program desa wisata. *Journal of Education Sciences*, 2(2), 60–69.
- Pane, A. S. A. S., Purba, A. T., Putri, H. R., & Harahap, L. M. (2025). Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(1), 122–129.
- Purwanta, Q., Qihaj, D. F., Auliarachim, H. N., & Mansurina, S. A. R. (2025). Digitalisasi pemasaran UMKM berbasis web dan geotagging. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi dan Teknologi Tepat Guna*, 3(1), 148–159.

Rahmawati. (2018). *Implementasi program inovasi desa (PID) di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*.

Rahminda, P., Solfema, S., & Putri, L. D. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan budaya lokal. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3, 209–215.

Sani, U. P. (2019). Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an. 39(1), 32–44.

Sipayung, J. (2013). Efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam perempuan PNPM Mandiri Perdesaan.

Suherman, M., & Rohaeni, N. (2023). Efektivitas program desa mandiri dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. *REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1534–1542.

Tania, I., Setyawan, F., & Adiwibowo, Y. (2025). Review pendidikan dan pengajaran. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 5771–5777.

Ulfatihmah H. (2020), *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassim, Pekanbaru, Riau.

Wahib, M., Stafrezar, B., & Susanto, A. (2024). Pembangunan desa berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 104–109.

Wahyu Saputra, D., & Jaya, R. (2023). Membangun kemandirian desa melalui perbandingan IDM. *Journal of Administration Studies*, 1(1), 21–29.

Yazfinfinezi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 14, 33–41.

Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Membangun Desa (IDM)

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Sumber Lain:

Akbar, W. (2023). Peningkatan Desa: Menenal Klasifikasi Status Desa. Transformasi Digital Desa. <https://digitaldesa.id>

Muallif. (2024). Desa Mandiri: Strategi Pembangunan, Potensi, dan Tantangan Menuju Kemandirian Desa. Universitas Islam AN NUR Lampung. <https://an-nur.ac.id/desa-mandiri-konsep-indikator-dan-contoh/>

Nabila, F. (2024). Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia. Smartlegal.Id. <https://smartlegal.id/>

<https://pmd.deliserdangkab.go.id/wp-content/berkas/1762513611.pdf>

https://bapenda.deliserdangkab.go.id/website/web/detail/19/potensi_daerah_kabupaten_deli_serdang

<https://www.pendamping-desa.com/2025/02/indeks-desa-membangun-idm-indikator.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pedoman Wawancara

Variabel / Indikator	Pertanyaan untuk Kepala Desa (Informan Kunci)	Pertanyaan untuk Sekdes / Kasi PMD & Pelaku UMKM (Informan Utama)	Pertanyaan untuk Masyarakat (Informan Tambahan)
1.KOMUNIKASI			
a. Transmisi (penyampaian informasi kebijakan)	1. Bagaimana proses penyampaian informasi terkait program pemberdayaan UMKM dilakukan kepada perangkat desa dan masyarakat? 2. Bagaimana desa memastikan bahwa informasi kebijakan disampaikan kepada perangkat desa dan masyarakat secara efektif?	1. Bagaimana Anda menerima informasi dari kepala desa terkait program UMKM? 2. Bagaimana mekanisme penyampaian informasi dari desa kepada pelaku UMKM?	1. Bagaimana Anda menerima informasi terkait program UMKM? 2. Apakah informasi tersebut mudah dijangkau?
b. Kejelasan (clarity)	1. Apakah kebijakan terkait pengembangan UMKM sudah disampaikan dengan jelas	1. Apakah informasi mengenai program sudah cukup jelas bagi Anda?	1. Apakah informasi yang Anda dengar sudah jelas? 2. Adakah hal yang

Variabel / Indikator	Pertanyaan untuk Kepala Desa (Informan Kunci)	Pertanyaan untuk Sekdes / Kasi PMD & Pelaku UMKM (Informan Utama)	Pertanyaan untuk Masyarakat (Informan Tambahan)
	kepada pelaksana di desa? 2. Adakah kendala dalam memahami tujuan dan mekanisme program pemberdayaan UMKM?	2. Adakah bagian tertentu dari kebijakan yang sulit dipahami?	membbingungkan terkait program?
c. Konsistensi	1. Apakah terdapat perubahan informasi atau instruksi dari pihak di atas selama pelaksanaan program? 2. Bagaimana desa menjaga konsistensi informasi terkait kebijakan UMKM kepada masyarakat?	1. Apakah terdapat perubahan informasi selama pelaksanaan program? 2. Bagaimana Anda memastikan konsistensi informasi kepada masyarakat?	1. Apakah informasi yang Anda terima konsisten dari waktu ke waktu? 2. Bagaimana Anda menilai perubahan informasi (jika ada)?
2. SUMBER DAYA			
a. Sumber Daya Manusia/ staff	1. Bagaimana kesiapan SDM perangkat desa dalam mengelola program pemberdayaan UMKM?	1. Apakah jumlah perangkat desa yang menangani UMKM sudah mencukupi? 2. Bagaimana kompetensi	1. Apakah perangkat desa cukup tanggap dalam mendampingi masyarakat? 2. Apakah tenaga

Variabel / Indikator	Pertanyaan untuk Kepala Desa (Informan Kunci)	Pertanyaan untuk Sekdes / Kasi PMD & Pelaku UMKM (Informan Utama)	Pertanyaan untuk Masyarakat (Informan Tambahan)
	2. Apakah jumlah dan kompetensi SDM sudah memadai untuk mendukung program?	aparatur dalam mendampingi UMKM?	pendamping UMKM sudah memadai?
b.fasilitas/sarana	1. Apakah desa memiliki fasilitas pendukung bagi UMKM seperti balai pelatihan, alat produksi, atau ruang pemasaran? 2. Adakah keterbatasan sarana yang menghambat pelaksanaan program?	1. Apakah desa menyediakan fasilitas yang mendukung UMKM? 2. Apa saja fasilitas yang masih belum tersedia?	1. Apakah fasilitas desa mendukung kegiatan pemberdayaan dan UMKM? 2. Apa saja kebutuhan fasilitas yang belum terpenuhi?
c. Kewenangan dan Informasi	1. Apakah pihak desa mendapat informasi yang cukup untuk menjalankan program secara mandiri? 2. Bagaimana kewenangan desa dalam mengambil keputusan terkait pengembangan UMKM?	1. Apakah desa memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola program UMKM? 2. Bagaimana akses Anda terhadap informasi teknis dan administratif?	1. Apakah Anda mudah mendapatkan informasi terkait program dari desa? 2. Apakah kewenangan desa terlihat dalam proses pemberdayaan masyarakat?

Variabel / Indikator	Pertanyaan untuk Kepala Desa (Informan Kunci)	Pertanyaan untuk Sekdes / Kasi PMD & Pelaku UMKM (Informan Utama)	Pertanyaan untuk Masyarakat (Informan Tambahan)
3. DISPOSISI (SIKAP PELAKSANA)			
a. Kemauan Dan Komitmen Pelaksana	1. Bagaimana komitmen perangkat desa dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM? 2. Apakah aparat desa menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung UMKM lokal?	1. Bagaimana sikap perangkat desa dalam membantu pelaku UMKM? 2. Sejauh mana tingkat kepedulian aparat terhadap perkembangan UMKM?	1. Bagaimana sikap perangkat desa terhadap kebutuhan masyarakat? 2. Apakah masyarakat merasa didukung oleh aparat desa?
4. STRUKTUR BIROKRASI			
a. SOP	1. Apakah desa memiliki SOP atau panduan teknis dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM? 2. Sejauh mana SOP tersebut dipatuhi oleh pelaksana?	1. Apakah terdapat SOP yang digunakan untuk mengelola program UMKM? 2. Bagaimana penerapan SOP tersebut di lapangan?	1. Apakah Anda mengetahui adanya prosedur yang mengatur program? 2. Apakah pelayanan administratif terasa mudah atau rumit?
b. fragmentasi	1. Bagaimana koordinasi antara desa, kecamatan, dinas terkait, dan	1. Bagaimana koordinasi dengan pihak kecamatan/dinas	1. Apakah masyarakat melihat adanya koordinasi antar

Variabel / Indikator	Pertanyaan untuk Kepala Desa (Informan Kunci)	Pertanyaan untuk Sekdes / Kasi PMD & Pelaku UMKM (Informan Utama)	Pertanyaan untuk Masyarakat (Informan Tambahan)
	lembaga lain dalam pelaksanaan program? 2. Adakah tumpang-tindih tugas atau hambatan birokrasi yang mempengaruhi implementasi program?	terkait? 2. Adakah hambatan koordinasi yang terjadi?	lembaga dalam program? 2. Adakah hambatan yang dirasakan akibat fragmentasi?

Lampiran 2

Pedoman Observasi

Pedoman observasi yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sikap Pegawai
3. Sarana Prasarana
4. Sikap pelaku UMKM

Instansi : Kantor Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang

Lokasi : Dusun III Damak Rambe, Desa Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20581.

No	Observasi	ya	Tidak	Keterangan
1.	Visi Misi	✓		Terdapat pada halaman 63
2.	Struktur Organisasi	✓		Terdapat pada halaman 64
3.	Sikap Pegawai	✓		1. Responsif 2. Kekeluargaan (mengayomi)
4.	Sarana Prasarana	✓		Dilihat secara langsung dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan
	a. Parkir			
	b. Ruang Tunggu			
	c. Ruang Kerja			
	d. Toilet			
	e. Ruang Arsip			

No	Observasi	ya	Tidak	Keterangan
	f. Papan Informasi g. Komputer			
5.	Data pelaku UMKM	✓		Terdapat pada halaman 127
6.	Sikap Pelaku UMKM	✓		Sopan, ramah, tamah, namun secara keseluruhan belum memahami program pemberdayaan UMKM
7.	Laporan pengaduan	✓		Kotak saran dikantor desa tanjung purba Call center 0812-6360-4812
8.	Website	✓		https://sites.google.com/view/desa-tanjung-purba-kec-bangun-/halaman-muka
9	Sosial media	✓		Tiktok https://tiktok.com/@desa_tanjung.purba Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61564962921610

Lampiran 3

Biodata Informan

1. Informan Kunci

Nama Lengkap : Tebe Holo Purba S.P
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Purba

2. Informan Utama

Nama Lengkap : Nurul Azizah S.E
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Desa Tanjung Purba

3. Informan Tambahan

Nama Lengkap : Zulkifli Lubis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 34 Tahun
Pekerjaan : Pedagang es tebu

Nama Lengkap : Suripah
Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Pemilik usaha kue dan makanan tradisional
Nama Lengkap : Cristine
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Penjahit

Nama Lengkap : Sri Hariati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30 Tahun
Pekerjaan : Pemilik usaha warung makan ayam penyet
Nama Lengkap : Sugito
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Usia : 30 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha

Lampiran 4

Dokumentasi dilapangan

1. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Tebe Holo Purba S.P selaku Kepala Desa Tanjung Purba



2. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurul Azizah S.E selaku Sekretaris Desa Tanjung Purba



3. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba Ibu
Cristine (Penjahit)



4. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba Ibu
Suripah (Pemilik usaha kue dan makanan tradisional)



5. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba

Bapak Zulkifli Lubis (Pedagang Es tebu)



6. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba

Bapak Sugito (Pemilik warung sembako)



7. Dokumentasi Wawancara Dengan Pelaku UMKM Desa Tanjung Purba Ibu
Sri Hariati (pemilik warung ayam penyet)



8. Dokumentasi Bangunan Kantor Desa Tanjung Purba



9. Dokumentasi Rekap Status Desa Di Kecamatan Bangun Purba Tahun 2025

REKAP STATUS DESA KECAMATAN BANGUN PURBA KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025

NO	DESA	TOTAL	BELUM INPUT	SUDAH INPUT						
				JUMLAH INPUT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
1	BAH BALUA	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	BAH PERAK	1	0	1	0	0	1	0	0	0
3	BANDAR GUGUNG	1	0	1	0	0	1	0	0	0
4	BANDAR KWALA	1	0	1	0	0	1	0	0	0
5	BANDAR MERIAH	1	0	1	0	0	1	0	0	0
6	BANGUN PURBA	1	0	1	1	0	0	0	0	0
7	BANGUN PURBA TENGAH	1	0	1	0	0	1	0	0	0
8	BATU GINGGING	1	0	1	0	0	1	0	0	0
9	BATU RATA	1	0	1	0	0	1	0	0	0
10	BEGERPANG	1	0	1	0	0	1	0	0	0
11	CIMAH	1	0	1	0	0	1	0	0	0
12	DAMAK MALIH	1	0	1	0	0	1	0	0	0
13	GREAHAN	1	0	1	0	0	1	0	0	0
14	MABAR	1	0	1	0	0	1	0	0	0
15	MAROMBUN BARAT	1	0	1	0	0	1	0	0	0
16	MAROMBUN UJUNG JAWI	1	0	1	0	0	1	0	0	0
17	PERGUROAN	1	0	1	0	0	1	0	0	0
18	RUMAH DELENG	1	0	1	0	0	1	0	0	0
19	SIALANG	1	0	1	1	0	0	0	0	0
20	SIBAGANDING	1	0	1	0	1	0	0	0	0
21	SUKALUWEI	1	0	1	0	0	1	0	0	0

NO	DESA	TOTAL	BELUM INPUT	SUDAH INPUT						
				JUMLAH INPUT	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL	TIDAK TERIDENTIFIKASI
22	TANJUNG PURBA	1	0	1	0	1	0	0	0	0
23	UJUNG RAMBE	1	0	1	0	0	1	0	0	0
24	URUNG GANJANG	1	0	1	0	0	1	0	0	0
TOTAL		24	0	24	2	2	20	0	0	0

Lampiran 5

Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3938/FIS.0/01.10/XII/2025 Medan, 18 Desember 2025
Lampiran. : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Irfan Shendy Sanutra Gultom
NIM : 228520028
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Tanjung Purba, kecamatan bangun purba untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“ Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Tanjung Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

